

JARINGAN AKTOR POLITIK LOKAL DALAM RELASI TRADISI BELIS (STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN ROTE NDAO)

Andrew Ermico Zacharias¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: andrewermico@gmail.com¹⁾, andreas.noak@yahoo.com²⁾, aliazhar23mr@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The Political history of the government was intervend of Political Actors in custom tradition is a problem inherent in the district of Rote Ndao, NTT Province. The research is to find out the role of Political Actors in playing the traditional ritual of Belis in DPRD and government political legitimacy and knowing the existence of interest and the power relations in Belis are useful for building a network in the Rote Ndao district of NTT Province. The theory used is Patron Klient theory, Identity Politics, and Power Networks. This research method is qualitative descriptive. Result collection techniques with in-depth interviews, observations, and documents. The results of this Belis tradition relationship in Rote could not be separated with that ethnic and religious identity factors. This study also received intervention from political actors in the Belis tradition who were interested in building a useful power relationship in Rote Ndao district.

Keywords : *Political Actors, Belis, Ethnic Religion, Indigenous Groups, and Power Networks*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat multikultur diberbagai daerah selalu diikat oleh tradisi dan Kebiasaan masing masing dan sangat bervariasi, salah satunya adalah masyarakat Kabupaten Rote Ndao dimana hubungan kekerabatan adat biasanya berlaku pada tataran adat dan budaya seperti hal nya belis. Kini tradisi ini sudah sampai pada penentuan kekuasaan politik yakni dengan menjalin kekuasaan melau tradisi ikatan perkawinan belis. Dimana salah satu unsur perkawinan adalah adanya pembayaran mas kawin atau *bride price* yang termasuk dalam upacara perkawinan. Prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, dan tiap suku di kabupaten

Rote Ndao memiliki cara untuk memaknai mas kawin itu sendiri. Namun demikian, ada satu persamaan dalam memahaminya bahwa mas kawin selalu memiliki arti secara material dan immaterial dan sampai saat ini belis telah menjadi bagian dari salah satu ritual yang juga melibatkan peranan kekuasaan sudah bisa didukung melalui jalur ini. Seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari : 1) mas kawin (*bride-price*). 2) pencurahan tenaga untuk kawin atau (*bride-service*). 3) pertukaran gadis (*bride-exschange*) (Koentjaraningrat, 1980 : 94). Melalui proses inilah pembentukan kelompok rumah tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan (kekerabatan), reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun

secara sosial berlangsung. Upacara adat perkawinan akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Walaupun dalam batasan ruang dan waktu akan mengalami perubahan. Demikian halnya dalam adat perkawinan masyarakat Rote Ndao, pemberian *belis* merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perkawinan disamping diikuti dengan dukungan dan legitimasi dari aktor yang akan menduduki jabatan kekuasaan politik baik di Pemilukada maupun di DPRD Kabupaten. Tradisi Belis adalah sejumlah harta yang diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga gadis dan kaum kerabat gadis. Arti *belis* atau mas kawin adalah sebagai pengganti wanita yang telah tiada dalam suku (*leo*) orang tuanya dan sebagai tanda terima kasih kepada keluarga wanita yang telah merelakan anaknya pindah ke tempat pria. Selain itu sebagai pembuka hubungan keluarga baru untuk seterusnya dan memberi nilai kepada seorang wanita, juga mempunyai nilai penting dalam rangkaian ikatan secara lahir batin bagi suami istri. Bentuk *belis* yang berupa hewan ternak dan beberapa benda seperti *tetafa* (tombak dan pedang), *kokoek* (pengganti air susu ibu) dan *dode diku* (balas *belis*) mempunyai fungsi sebagai alat pengesahan perkawinan, memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi moral bahkan sekaraang menjurus pada pengaruh kekuasaan politik dan juga dimaknai sebagai lambang status perempuan yang bermakna sebagai pengakuan terhadap martabat seorang wanita yang dihargai dan dihormati dengan pemberian *belis* sebagai ikatan adat yang sah. Tetapi

dalam prakteknya kebiasaan membayar mas kawin pada jaman dahulu sampai saat ini telah banyak mengalami pergeseran. Beberapa kebijakan pimpinan politik menjadi perdebatan dan komoditas atas kepentingan kultural dimana aktor politik dari partai Golkar dan Gerindra yang beseberangan Eston Foenay dan Ibrahim Medah masa sebelumnya kedua tokoh ini memiliki pengaruh kekuasaan yang dominan di Rote Ndao tetapi dengan terjadi peristiwa adat pada perkawinan belis di Rote Ndao antara marga dari kedua tokoh tersebut maka dengan ritual belis ini telah menjadikan kedua tokoh menyatakan menerima belis dengan pergeseran peran adat dari ritual belis ke kekuasaan menjadi kepala daerah di Rote Ndao. Kasus ini menjadi suatu pergeseran bisa menjadi perubahan paradikma koalisi kekuasaan yang mendasari tradisi perkawinan belis sebagai ritual melalui kesepakatan dan mobilisasi massa pendukung mengantarkan elite mereka menduduki jabatan Bupati Rote Ndao.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian yang melatar belakangi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah berikut : Bagaimana peran Aktor Politik Lokal melegitimasi kekuasaan Politik melalui Relasi Tradisi Belis ? (Studi Kasus Masyarakat kabupaten Rote Ndao)

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui peran aktor politik lokal memainkan tata ritual tradisi adat belis

dalam legitimasi politik di kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur

- b. Untuk kepentingan dan relasi kekuasaan aktor politik dalam belis membangun jaringan kekuasaan di kabupaten Rote Ndao.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian konsep pustaka ini akan dibahas beberapa bahan kajian pustaka yang mendukung analisis substansi jaringan aktor politik lokal dalam relasi tradisi belis di Kabupaten Rote Ndao . Dalam penelitian ini digunakan perspektif aktor politik, jaringan kekuasaan dan relasi belis khususnya teori-teori Jaringan kekuasaan, politik identitas dan patrón klient melalui perspektif Primordialisme (etnik). Selain itu, juga dipakai beberapa konsep-konsep pendukung seperti persaingan dan kekuasaan. Dalam hal membangun jaringan politik merebut kekuasaan, hanyalah untuk memperebutkan posisi penting dalam suatu jabatan. Jaringan untuk kekuasaan terjadi jika beberapa aktor/elit memiliki tujuan yang sama yakni merebut kekuasaan dan ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang sama. Jadi jaringan kekuasaan akan tergambar pada elemen perilaku pelaku, proses dan struktur adat (Manson, 1950). Jika kita menganalisa suatu jaringan kekuasaan hendaknya dilandasi oleh teori-teori mengenai aktor/elit, politik identitas etnik, patrón klient dan struktur primordialisme di suatu daerah. Penelitian ini memfokuskan pada jaringan aktor lokal dalam relasi tradisi belis untuk mendapat kekuasaan di Kabupaten Rote Ndao NTT. Berbagai persoalan dihadapi

oleh aktor politik lokal hanya pada kesempatan membangun jaringan kekuasaan melalui tradisi yang dilanggengkan dalam suatu upacara ritual adat yakni belis sebagai imbalan menuju jalan kekuasaan politik karena acara ini di kendalikan sepenuhnya oleh patrón yang dianggap dituakan dalam kekuasaan adat. Apabila dukungan adat dalam kelompok tradisi masyarakat belis yang harus wajib oleh ikatan kekerabatan terpenuhi maka harapan kedepan bisa dijadikan legitimasi mendukung aktor yang berperan dari ikatan perkawinan adat belis yang berlangsung saat itu. Secara sosial suku dan adat bisa dipakai sebagai alat loyalitas membangun jaringan aktor politik melalui tradisi belis yang berlaku di kabupaten Rote Ndao Kupang NTT.

Jaringan Kekuasaan

Tradisi aktor dalam membangun relasi kekuasaan merupakan gunjingan semua kekuatan politik baik di tingkat elite/aktor dan massa. Jaringan kekuasaan dalam konteks ini, dipahami sebagai kualitas, kapasitas, atau modal untuk mencapai kekuasaan dari aktor yang melakukannya. Dalam membahas penelitian ini, penulis menggunakan konsep kekuasaan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Michel Foucault merupakan seorang filsuf dan juga sejarawan, karya - karyanya menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan menjadi fokus dalam karir intelektualnya. Kekuasaan menurut Foucault (1990), tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan

juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

"... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony." (Foucault, 1990: 92-93 dalam Mudhoffir, 2013 : 79, Vol. 18).

Dengan demikian, kekuasaan dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang berasal dari pikiran diri sendiri dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan.

Patron Klien

Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan timbal-balik. Hubungan ini dilakukan secara vertikal (satu aktor kedudukannya lebih tinggi) maupun secara horizontal (masing-masing aktor kedudukannya sama). Istilah *patron* berasal dari Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh (Usman, 2004:132). Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari sebuah ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosioekonominya yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*klien*). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada *patronnya*.

Politik Identitas

Kajian politik identitas sering diartikan sebagai sebuah bentuk karakter jati diri dari sebuah proses dinamika golongan etnik yang tumbuh bersama dengan sebuah institusi negara (*State*), (Suparlan, 2004). Etnik dan agama dalam politik identitas juga dimaknai sebagai relasi kekuasaan dalam suatu

masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa. Sedangkan identitas sendiri merupakan representasi dari budaya, simbol maka identitas lebih memusatkan perhatian pada artikulasi yang tersusun atas kelompok-kelompok seperti etnik dan agama yang mengeksplorasi pemahaman ini dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang berbeda dalam masyarakat (identitas) telah membagi ruang sosial menjadi kelompok-kelompok yang berbeda sehingga pola pemahaman masyarakat di Kupang akan memandang identitas mereka senantiasa berbeda dalam arti lebih memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi tindakan elite dalam menentukan kekuasaan.

Konseptualisasi Etnik/Suku

Etnik atau etnisitas dipahami sebagai suatu identitas kelompok yang sangat eksklusif dan relatif berskala besar, didasarkan pada ide kesamaan asal-usul serta keanggotaan yang terutama berdasarkan kekerabatan. Dengan demikian, etnik adalah kelompok yang dibedakan oleh warna kulit, bahasa dan agama, etnik meliputi suku bangsa, ras, kebangsaan dan kasta (Haralambos and Holborn, 2000). Berbagai pernyataan akademik sering menonjolkan kategorisasi yang digunakan untuk menggolongkan seseorang sehingga ia dapat dikatakan sebagai anggota dari suatu etnis tertentu. Harowitz (1985:52) melihat dari faktor kelahiran dan darah. Dengan faktor tersebut maka seseorang dapat dibedakan atas warna kulit, bahasa dan kepercayaan. Sedangkan Rudolf (1986:2) melihat faktor batas-batas

wilayah dalam sistem politik tertentu sebagai pertimbangan utama. Jadi, walaupun seseorang berbeda warna kulit dan bahasanya, tetapi jika ia tinggal dalam suatu wilayah tertentu, maka ia sudah dapat dikatakan satu etnis. Dari tinjauan psikologi, seseorang dikategorikan satu etnis apabila (1) siap secara mental untuk berkorban baik untuk kepentingan etnisnya atau dirinya sendiri, (2) orang yang bergabung dalam kelompok etnik cocok dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok etnik yang lain (Hogg & Mullin, 1999 dalam E. Hale, 2004 ; 473). Dari berbagai indikator ini, penanda-penanda penting dari suatu etnis tercermin dari identitas kultur yang terdiri dari ras, bahasa, agama dan adat istiadat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang jaringan aktor politik lokal dalam relasi tradisi belis dalam kaitannya dengan jaringan aktor politik lokal, politik identitas etnik dan patrón klient di Rote Ndao Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, dari segi metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisa deskriptif karena metode ini lebih berfokus pada analisa pemahaman dan pemaknaan tindakan politik aktor dalam relasi kekuasaan belis. Dalam penelitian ini, semua hasil temuan baik data dokumen, wawancara, observasi di lapangan akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan konsep-konsep teoretik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan secara sampling yakni

purposive sampling dan dipadukan dengan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan kabupaten paling selatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Rote Propinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjadi daerah otonom, Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Bupati Christian Nehemia Dillak, S.H dan Wakil Bupati Bernad Efandris Pelle, S. IP (2003-2008). Pada periode kedua dipimpin oleh Bupati Drs. Leonard Haning, M.M dan Wakil Bupati Drs. Marthen Luther Saek (2008-2014). Pada periode ketiga yang masih berjalan sampai saat ini dipimpin oleh Bupati Drs. Leonard Haning, M.M dan Wakil Bupati Jonas Cornelis Lun S.Pd. Penduduk di Kabupaten Rote Ndao memiliki komposisi heterogen, antara lain penduduk asli Rote Ndao dan pendatang dari luar Kabupaten Rote Ndao lainnya dalam propinsi NTT seperti etnis Sabu, Timor, Flores, Alor dan lain-lain, sedangkan dari luar propinsi NTT seperti Bugis, Bajo, Jawa, Jawa, Bali, Lombok dan Batak. Berdasarkan data kependudukan tahun 2017 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao

mencapai 153.792 jiwa yang terdiri atas 78.356 jiwa laki-laki dan 75.436 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lobalain yaitu 31.817 jiwa sedangkan Kecamatan Ndao Nuse dengan jumlah penduduk 3.963 jiwa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tersedikit.

Kondisi Politik di Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Nda'o

Salah satu kekuatan yang memainkan peranan penting dalam penentuan komposisi elite di Kabupaten Rote N'dao (di samping faktor-faktor etnik) adalah faktor hubungan kekerabatan. Masyarakat Rote sangat menghargai asal-usul kelompok kekerabatan. Kampung tidaklah sekedar gugusan rumah tempat tinggal melainkan juga gugusan adat. Orang Rote sangat terikat dengan kampungnya karena di dalam kampung terdapat kelompok kekerabatannya yang masing-masing anggotanya saling terkait dan berjaring. Faktor jaringan kekerabatan terlihat pula pada komposisi anggota keluarga dalam tim sukses kampanye calon elite Bupati dan DPRD Kabupaten. Tim sukses pasangan Alfred Saudila dan Ruben Manu misalnya sebagian besar berasal dari lingkungan kaum keluarganya. Masing-masing kandidat juga berusaha mendayagunakan anggota dan jaringan kekerabatan untuk mendapatkan dukungan. Salah satu cara yang umum dipakai oleh kandidat adalah mengkampanyekan program serta menampilkan latar belakang kebanggaan anggota-anggota kaum

keluarganya dan juga melalui ritual perkawinan belis dari anak-anak mereka. Orang Rote umumnya bangga kalau ada anggota kaum keluarga dalam kelompok etniknya yang menempati posisi penting di tingkat elite bupati dan DPRD. Adanya anggota keluarga yang menjadi pejabat bisa menaikkan status kaum keluarga dalam masyarakat.

Peranan jalur kekerabatan dalam menarik dukungan masa pendukung di Rote bisa dilihat dari hasil Pemilu Legislatif dan Pilkada. Dari delapan kecamatan di Rote yakni Kecamatan Lobalain, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, Rote Timur, Landu Leko, Ndao Nusa. Kandidat yang memperoleh kemenangan cukup besar terjadi di wilayah basis Golkar dan PDIP. Misalnya, di Kecamatan Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Timur, Lobalain yang basis massanya cukup banyak yakni di Baa, Dengka, Termanu, Dengka, Oenale didominasi oleh Golkar dan PDIP, karena pola masyarakat Rote dengan ikatan kekeluargaan yang kuat membuat mereka menyamakan garis kekuasaan yang menempatkan elite baik untuk legislatif dan Bupati tidak boleh berlawanan dengan struktur kekuasaan yang dibangun dari pola adat dan budaya, sehingga dominasi kekuasaan keluarga sangat penting dalam melibatkan mereka yang akan menduduki kekuasaan. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa elemen-elemen yang saling terkait secara fungsional yang menyusun sistem politik di tingkat kabupaten sudah tersedia, beberapa elemen yang dapat menjadi saluran tuntutan dukungan dan

aspirasi masyarakat adalah DPRD, parpol, dan pemerintahan di semua aras (RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten). Walaupun begitu dua elemen utama yang seharusnya berfungsi dengan baik yakni DPRD dan Parpol, sementara itu kadang adanya persaingan tersembunyi antara elite DPRD dan Parpol yang kadang menjurus ke wacana dan tindakan destruktif juga menjadi penyumbat jalannya aspirasi rakyat melalui adat dan budaya setempat sekaligus menghancurkan sistem politik yang ada, apabila kondisi ini tidak ditengarai dengan baik maka kemungkinan akan ada tindakan resistensi dari rakyat secara massal pasti akan bisa terjadi karena elite masih komunal dalam kelompoknya sendiri yang dikaitkan oleh patron kliennya.

Mobilisasi Massa Keluarga dalam Struktur Sosial Oleh Aktor Politik Lokal

Stratifikasi dan struktur sosial masyarakat Rote masih tunduk pada garis kekuasaan pendahulu dan warisan generasi yang secara kultur masih menjadikan revitalisasi budaya dan belis dimana belis atau mahar tidak boleh melebihi harga yang ditentukan oleh ketua adat setempat. Dengan demikian mobilisasi massa keluarga tetap given sesuai adat yang diterima secara bersama-sama, akan tetapi harga belis tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial keluarga, pendidikan calon mempelai, hasil negosiasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan serta kedekatan hubungan antar keluarga kedua calon mempelai, jabatan dalam struktur organisasi,

jabatan dalam kekuasaan legislative dan birokrasi serta keadaan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi status sosial keluarga adalah adanya aktor politik didalam keluarga calon serta afiliasi silang dalam pertukaran politik dan belis secara otonom mengikat pihak keluarga yang telah dimobilisasi dalam kepetingan dukungan melalui legitimasi adat di Rote serta para pihak yang akan melaukan mahar dari kedua mempelai. Dalam hal ini lah berkaitan dengan teori yang ada , dengan adanya status sosial dari aktor politik yang lebih tinggi didalam proses mobilisasi untuk kepentingan dukungan, diharapkan akan terciptanya hubungan timbal-balik, dimana keluarga yang memiliki status sosialnya lebih rendah mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan suatu kedudukan penting di dalam birokrasi dengan terpilihnya anggota keluarga yang ada , menjadi bupati dengan dukungan yang telah diberikan. (Patron Klient, hubungan timbal-balik dari orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi). Didalam hal ini penulis mendapatkan sebuah fakta menarik bahwa apabila salah satu pihak memiliki jabatan penting di Kabupaten Rote Ndao, belis atau mahar tersebut tidak dapat di kurangi dan tetap sesuai dengan kesepakatan awal yang telah terjadi diantara kedua keluarga. Akan tetapi, dengan adanya Jabatan yang tinggi didalam pemerintah daerah Rote Ndao, maka belis atau mahar tersebut berkemungkinan akan semakin besar harganya. Semakin tinggi jabatan yang ada maka kemungkinan semakin besar pula harga belis yang akan diminta. Dalam hal ini juga, terdapat fakta bahwa terjadinya

pernikahan antara anak dari anggota DPRD Rote Ndao merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk membangun relasi kekuasaan di antara kedua partai yang berbeda dari kedua keluarga tersebut karena adanya kebersamaan melalui pernikahan yang terjadi. Hal ini akan terjadi selama pernikahan itu berjalan dalam lingkaran patrilineal secara primordial mengikat hak hak kesukuan dalam keputusan politik. Dengan campur tangan aktor politik didalam tradisi adat Belis, membawa sebuah politik identitas di dalam proses Belis tersebut. Campur tangan dari Aktor Politik ini juga yang menimbulkan prasangka adanya usaha untuk membentuk sebuah jaringan kekuasaan lewat tradisi Belis , dengan adanya pernikahan lewat adat Belis diantara anak dari Ketua Partai Politik yang berbeda di Kabupaten Rote Ndao memiliki kepentingan politik didalamnya, agar terbangun sebuah relasi kekuasaan diantara kedua keluarga untuk mencapai suatu tujuan politik di Kabupaten Rote Ndao. Dengan terjadinya perkawinan Belis tersebut, maka hubungan kekerabatan diantara kedua keluarga akan semakin erat sehingga mobilisasi massa keluarga untuk mendapatkan dukungan dalam proses pilkada dengan mudah dapat dilakukan. Jaringan kekuasaan yang dibangun hanyalah bertahan selama 5 tahun masa jabatan politik yang ada, tetapi setelah berakhirnya relasi politik yang dibangun melalu perkawinan Belis tersebut tidak dapat mempengaruhi harga dan ketentuan Belis yang telah disepakati sebelumnya. Setelah memenangkan Pilkada , maka dilakukanlah upacara adat yang berguna untuk mempersatukan kembali masyarakat dari

beberapa Nusak di Rote Ndao yang sebelumnya memiliki pilihan politik yang berbeda. Tetapi dalam prakteknya sekarang ini, Tradisi Adat tersebut yang biasa disebut dengan *Henak Anan* dan *Lanak Anan* mulai digunakan untuk tujuan para anggota keluarga mendapatkan jabatan politik didalam birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Belis Sebagai Alat Kekuasaan

Para elit kekuasaan selalu menciptakan hubungan dominatif di antara mereka dan massa etniknya dalam lingkungan keluarga sendiri, dan selalu memanipulasi identitas kultural serta memainkan peran penting dalam mengolah emosi masa untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai urgensi dari perjuangan meraih kekuasaan di DPRD dan elite bupati . Etnik Rote biasanya juga berharap ingin berintegrasi dan menuntut pengakuan dari masyarakat, disisi lain, mereka juga berharap mendapat pengakuan yang lebih besar atas identitas kultur mereka. Tujuannya agar mereka bisa menerima perbedaan pandangan pada pola dan upacara adat belis secara demokratis. Hubungan semua pembahasan ini dalam kaitannya dengan semua masalah penelitian maka, pembahasan ini memberikan gambaran secara spesifik baik dari semua jenis ritual upacara adat belis serta para elite yang terlibat satu identitas telah memberi warna tersendiri untuk seseorang elite politik bisa mendapat dukungan serta keabsahan legitimasinya menjadi pimpinan di DPRD dan Bupati. Sesuai bagan pada bagian awal bab pembahasan dengan berbagai cara serta pola penggunaan etnik dalam upacara adat belis maka elite politik

secara otonom masih selalu berhubungan langsung dengan massa kelompok tokoh adat tokoh masyarakat dan agama untuk bisa diterima berdasarkan basis kekuasaan yang diinginkan.

Pada elite pemerintahan dan DPRD selain basis Ritual upacara belis, maka etnik dari berbagai suku yang ada di Rote juga menentukan cara pola serta alasan-alasan seseorang elite mendapat dukungan untuk bisa berkompetisi meraih kekuasaan, pola ini merupakan strategi yang bisa mengembalikan kepercayaan kelompok atas dukungan yang diberikan pada elite tersebut. Jika dukungan melemah maka elite akan melihat dari cara-cara kelompok masyarakat adat yang terlibat melalui legitimasi dewan gereja maka elite dengan sendirinya dapat membangun kerja sama diantara kelompok mereka.

Implikasi Temuan bagi Politik Lokal di Indonesia.

Studi Belis dan kekuasaan politik di Rote, sebelumnya menemui kelemahan sebagai temuan utama dari berbagai jenis, pola serta cara elite menggunakan etnik, agama dan ritual adat belis sebagai instrumen kekuasaan dengan asumsi, bahwa kegagalan elite dalam membangun kekuasaan serta adat dan kebudayaan di Rote selama ini justru terletak pada kegagalan untuk membedakan kepentingan suku yang bervariasi, hanya karena loyalitas adat saja mereka bisa bersatu dalam keputusan adat secara kolektif. Akibat yang ditimbulkan dari kurangnya merangkul prasaan komunal secara keseluruhan maka aalaan adat sebagai benteng melembagakan

kekuasaan baik di DPRD dan Kekuasaan Bupati. Politik lokal di Rote tidak menempatkan daerah sebagai ruang politik, tetapi sebagai ruang kultural berjalan beriringan dengan pelembagaan kekuasaan sehingga nilai kultur yang berdasarkan budaya dan sejarah masa lampau telah menjadikan kehidupan politik di Rote lebih didasarkan pada hubungan yang bersifat primordial yang telah tumbuh subur. Berbagai keinginan untuk menempatkan elite darah sebagai elite politik dan birokrasi hanya merupakan kenyataan dalam ruang kultural tidak dalam ruang publik yang mensyaratkan persamaan dan keseimbangan etnik dan agama sehingga etnik dominan tetap mempertahankan dominasinya. Perubahan yang terjadi bagi perkembangan politik lokal di Rote, beberapa etnik dalam sebutan orang Rote di sana mungkin kurang saling berinteraksi. Tetapi dengan adanya ikatan budaya dan kekerabatan adat yaitu persaingan kekuasaan di jabatan politis dan birokrasi, maka semua etnik terikat dalam komunitas interaksi untuk merebut dan mempertahankan. Maka jadilah sebuah Rote yang plural meskipun mungkin ada puluhan ribu orang yang tidak pernah bertemu etnis lain di Rote seumur hidupnya.

5. Kesimpulan

Jaringan aktor politik lokal dalam relasi tradisi belis di Rote tidak bisa dipisahkan dengan bahwa faktor identitas etnik dan agama sangat berpengaruh kuat pada loyalitas elite secara turun-temurun pada individu, juga kelompok etnik, agama dan adat. Dengan

melihat Liddle (1970) Bahar (1997), Liliweri (1995) dalam penelitian ini, temuan empiris terhadap segenap upaya elite menggunakan identitas etnik, agama dan adat untuk mencapai kekuasaan di DPRD Kabupaten Rote dan Jabatan Bupati, memperlihatkan adanya penambahan dan penyempurnaan konsep-konsep politik identitas, *patrón klient*. Seperti yang dikemukakan oleh Geertz dengan menggunakan instrumen identitas etnik dan agama guna mencapai kekuasaan dan mempertahankannya. Hubungan kekuasaan hanya terjadi dalam perspektif etnik, agama dan adat secara instrumental.

Dalam kaitan dengan pelembagaan kultural di Rote, saya ingin menyumbangkan sebuah posisi intelektual untuk memperkokoh pemahaman kultur dan demokrasi yang sangat loyal pada tradisi adat di Rote. Saya berpendapat bahwa ada beberapa proposisi penting, pertama, Masyarakat Rote membutuhkan suatu kehidupan bersama dalam ikatan *patron klient* dan mengikat identitas mereka dan bisa menjadi pengakuan untuk kesetaraan dalam semua wilayah etnik agama dan adat di Rote. Sehingga relasi belis melalui ikatan etnik, agama dan adat akan berkembang dengan baik dalam pemerintahan demokratis dengan didukungnya pemahaman secara terbuka karena di Rote semua orang hanya mengidentikkan dirinya dengan wilayah agama dan adatnya sendiri.

6. Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, 2002. *Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Terj) Daniel Dhakidae – Pengantar, Penerbit

- INSIST, Yogyakarta, Judul Asli
Imagined Communities :
Reflections on the origin and
Spread of Nationalism.
- Anderson, Benedict, 1999. *Mencari Demokrasi*,
Institut studi arus Informasi,
cetakan pertama, Mei
- Andrea K. Molnar, 1999. "Kemajemukan Budaya
Flores: Suatu Pendahuluan",
dalam *Antropologi Indonesia*, No.
56, Thn. XXII, Mei – Agustus 1998.
Jakarta: Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia. Lihat
juga Dami N. Toda, *Manggarai
Mencari Pencerahan Historiografi*.
Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Barth, Fredrik, 1988. *Kelompok etnik dan
batasannya*, Jakarta, UI Press.
- Bahar, Syafoedin, 1997. *Elite, Etnik serta
Negara Nasional*, Prisma No. 4
Tahun XXVI, April.
- Bennett, David. *Multicultural State ; Rethinking
Difference and Identity*.
Routledge, London and New
York.
- Bottomore, 2002. *Elite dan Masyarakat*, Akbar
Tanjung Institute, Jakarta.
- Boxer C.R, 1974. *The Topasses of Timor*,
Amsterdam ; Het Indisch Instituut.
- Cohen, Abner, 1981. *The Politics Of Elite
Culture*, Berkeley & Los Angeles.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik
Dalam masyarakat Industri* (terj)
Sebuah Analisa Kritis Dahrendorf.
Ali Mandan. Cet I, Jakarta.
- DPD I KNPI NTT, 1985. Apa kata mereka. 25
Tahun Nusa Tenggara Timur,
sebuah bunga rampai.
- David Bennett, 1974. *Multicultural State*,
Rethinking Diffrence and Identity.
London and New York.
- Fox, James, 1986 *Bahasa sastra dan Sejarah*,
*Kumpulan karangan mengenai
Masyarakat Pulau Roti*, Penerbit
Jembatan Jakarta.
- Geertz, Clifford, 1983. *The Religion of Java*.
Terjemahan A. Mahasin. Abangan,
*Santri, Priyayi Dalam Masyarakat
Jawa*. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
The Integrative Revolution.
*Primordial Sentiments and Civil
Politics in the New State*. Dalam
Old Societies and New State. The
Quest for Modernity in Asia and
Africa, Clifford Geertz (penyunting).
London, The Free Press. 1963. P.
105-157.
- Havilland, William A., 1993. *Antropologi Jilid 2*.
Jakarta : Erlangga
- Hidayat, ZM, 1984. *Masyarakat dan
Kebudayaan. Suku-suku bangsa di
Nusa Tenggara Timur*. Penerbit
Tarsito Bandung.
- I.H. Doko Dalam Kata Pengantar Untuk Buku
Sejarah Politik Pemerintahan Asli,
Sejarah Raja-RTaja di Rote Timu yang
ditulis oleh ADM. Parera (20-05)
- Inyo Yos Fernandez, (1990). Mengungkapkan
bahwa bahasa-bahasa di Flores,
termasuk bahasa Kedang,
bersumber pada sebuah bahasa

- proto yang sama, yang Bahasa Flores (*Flores Language*). Dengan demikian, ada kekerabatan bahasa (dan tentu saja juga budaya) di kalangan Orang Flores. Bukti lain adanya kekerabatan ini diberikan oleh Fernandez tentang *agama dan kepercayaan*, dan Orinbao (1960) tentang *mitos dan ritual asli orang Flores*.
- Issacs, Harold R., 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik* (terjemahan). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat.,1980. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta
1990. Sejarah Teori Antropologi Jilid II. Jakarta : UI Press
- Kana, Ch. 1969. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Thesis.
- Kana, C. 1986. *Arsitektur tradisional daerah Nusa Tenggara Timur*, Depdikbud, Jakarta.
- Koentjaraningrat.,1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
1990. *Sejarah Teori Antropologi Jilid II*. Jakarta : UI Press
- Liliweri, Alo, 1995. *Prasangka Sosial dan Efektivitas komunikasi Antar Etnik* di Kupang, Disertasi, Unpad Bandung.
- Lay, Cornelis, 1993. Wacana SARA Dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Edisi No. 1 Tahun 1997.
- Muhajir, Noeng, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Penerbit rake Sarasin, Yogya.
- Monografi Nusa Tenggara Timur, Rote, Sabu, 1975. Proyek pengembangan media kebudayaan jilid I dan II.
- Maran, Rafael Raga., 2000. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nasikun, 2002. *Etnisitas Dalam Bingkai Nasionalisme dan Civil Society di Tingkat Lokal*, Makalah, Oktober.
- Parera, 1987. *Sejarah politik pemerinthan asli di Timor*, Penerbit Balai pustaka, Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2004. Hubungan Antar Suku Bangsa, Penerbit KIK Press. Jakarta.
- Proyek Penelitian dan Pencacatan kebudayaan daerah, Pusat penelitian sejarah dan budaya Depdikbud, 1979. *Sejarah kebangkitan nasional daerah Nusa Tenggara Timur*.
- Ritzer, George, 2000. *Sociological Theori*, Fifth Edition, University of Maryland.
- Sparringa, Daniel T. 2004. *Multikulturalisme di Indonesia: Perspektif Sosiologi Politik* , dalam Etika Multikultural. Surabaya: Ubaya Press.
- Soekanto, Soerjono., 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press
- Sparringa, Daniel T. 2005. *Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif*. Sebuah

Perspektif Sosiologi Politik. Work Paper di sampaikan pada kursus dan pelatihan singkat HAM dan demokrasi yang diselenggarakan oleh CESASS-UGM bekerja sama dengan NCHR-Olso University, Norwegia, Yogyakarta, 28 Nopember 2 Desember 2005.

Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Grasindo.

Suhartono, dkk, *Politik Lokal*, Parlemen desa Awal Kemerdekaan sampai jaman Otonomi Daerah.

Soekanto, Soerjono., 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press Van Peursen, C.A., 1988. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius .

Van Peursen, C.A., 1988. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius